

PERSEPSI MASYARAKAT DAN ANALISIS *WILLINGNESS TO PAY* TERHADAP KEBIJAKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR STUDI DI JAKARTA DAN BANDUNG

PUBLIC PERCEPTION AND WILLINGNESS TO PAY ANALYSED IN PLASTIC BAG PAID POLICY STUDY IN JAKARTA AND BANDUNG

Anih Sri Suryani

(Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara II, Lantai 2, DPR RI,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia;
email: anih.suryani@dpr.go.id)

Naskah Diterima: 1 November 2016, direvisi: 25 November 2016,
disetujui: 2 Desember 2016

Abstract

Plastic waste has caused increasingly complex problems from year to year in Indonesia. In an effort to reduce landfill waste plastic, the government introduced a plastic bag paid policy in several cities. This article examine public perception on public willingness to pay (WTP) on use of plastic bag. Quantitative research was conducted by survey and questionnaire in Jakarta and Bandung. Finding shows that people agree that plastic waste should be properly managed. However, the number of people who agree and disagree with the imposition of tariffs on plastic bags are relatively balanced. Also, the amount of society's WTP of a plastic bag is higher than the amount during the trial, namely >Rp1.000,-. Based on regression analysis, this research found that the factors affecting society's WTP amount were the age and the place of where people normally do the monthly shopping.

Keywords: *willingness to pay, paid plastic bag policy, waste management, Jakarta, Bandung.*

Abstrak

Sampah plastik di Indonesia menimbulkan permasalahan yang kian rumit dari tahun ke tahun. Untuk mengurangi timbunan sampah plastik, pemerintah melakukan uji coba kebijakan kantong plastik berbayar di beberapa kota. Tulisan ini bertujuan mengkaji persepsi masyarakat dan menghitung *willingness to pay* (WTP) masyarakat akan kebijakan tersebut. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan *survey* dan penyebaran kuesioner pada masyarakat di DKI Jakarta dan Kota Bandung. Temuan mengungkapkan masyarakat sangat setuju apabila sampah plastik dikelola dengan baik. Namun, jumlah masyarakat yang setuju pengenaan tarif pada kantong plastik dan tidak setuju pengenaan tarif jumlahnya relatif berimbang. Besaran WTP masyarakat akan kantong plastik berbayar relatif lebih besar dari harga kantong plastik yang pernah diujicobakan, yakni >Rp.1000,. Berdasarkan analisis regresi, faktor yang mempengaruhi besaran WTP masyarakat adalah usia dan tempat masyarakat biasa melakukan belanja bulanan.

Kata kunci: *willingness to pay, kebijakan kantong plastik berbayar, pengelolaan sampah, Jakarta, Bandung.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkotaan atau kawasan metropolitan merupakan perwujudan perkembangan yang alamiah dari suatu proses globalisasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan karakteristik dan persoalan yang berbeda dan spesifik. Oleh karenanya suatu perkotaan memerlukan pengelolaan tersendiri dalam pemecahan persoalan yang dihadapi.

Salah satu persoalan perkotaan yang cukup krusial adalah masalah sampah kota. Hingga saat ini, persoalan sampah di perkotaan tak kunjung selesai. Tingginya kepadatan penduduk membuat konsumsi masyarakat pun tinggi, sementara lahan untuk menampung sisa konsumsi terbatas. Pengelolaan sampah perkotaan yang tidak tuntas, tidak saja menyebabkan situasi

lingkungan perkotaan nampak tidak estetik namun juga menimbulkan persoalan-persoalan lainnya seperti banjir, pencemaran lingkungan, penurunan derajat kesehatan masyarakat, dan juga masalah sosial.

Sampah dapat diartikan sebagai konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia. Setiap tahunnya, dapat dipastikan volume sampah akan selalu bertambah seiring dengan pola konsumerisme masyarakat yang semakin meningkat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2012 mencatat rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 2,5 liter sampah per hari atau 625 juta liter dari jumlah total penduduk. Kondisi ini akan terus bertambah sesuai dengan kondisi lingkungannya.¹ Menurut Statistik Sampah

¹ Tempo.co, 15 April 2012, Indonesia Hasilkan 625 Juta Liter Sampah Sehari, (*online*), (<http://www.tempo.co/read/news/2012/04/15/063397147/Indonesia-Hasilkan-625-Juta-Liter-Sampah-Sehari>, diakses tanggal 2 Februari 2016).

Indonesia (2012), jumlah sampah yang timbul di seluruh Indonesia mencapai 38,5 juta ton per tahun dengan dominan sampah tersebut berada di Pulau Jawa (21,2 juta ton per tahun). Sampah tersebut termasuk dari sampah organik dan anorganik.² Jumlah peningkatan timbulan sampah di Indonesia telah mencapai 175.000 ton/hari atau setara 64 juta ton/tahun. Tantangan terbesar pengelolaan sampah adalah penanganan sampah plastik yang tidak ramah lingkungan. Upaya pengurangan timbulan sampah plastik baik di sumber sampah, maupun di tempat pembuangan akhir menjadi tantangan pengelolaan sampah ke depan bagi Pemerintah Indonesia.³

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengamatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul-angkut-buang, menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru. Paradigma yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk, dan bahan baku industri. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif. Dimulai dari hulu, yaitu sejak suatu produk yang berpotensi menjadi sampah belum dihasilkan. Dilanjutkan sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan, sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Kegiatan pengurangan sampah bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas; melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. Meskipun demikian, kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, dan masih banyaknya dihasilkan sampah non-organik

yang tidak dapat diurai dengan cepat seperti plastik. Indonesia bahkan masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke Laut setelah Tiongkok. Sampah plastik yang dibuang ke laut pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 187,2 juta ton (sedangkan Tiongkok diperkirakan mencapai 262,9 juta ton). KLHK menyebut bahwa plastik hasil dari 100 toko atau anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dalam waktu satu tahun saja, sudah mencapai 10,95 juta lembar sampah kantong plastik. Jumlah itu ternyata setara dengan luasan 65,7 hektar kantong plastik atau sekitar 60 kali luas lapangan sepak bola. Jumlah sampah Indonesia di 2019 diperkirakan akan mencapai 68 juta ton, dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton atau 14 persen dari total sampah yang ada.⁴

Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, KLHK menargetkan pengurangan sampah plastik lebih dari 1,9 juta ton hingga 2019. Target pengurangan timbulan sampah secara keseluruhan sampai dengan 2019 adalah 25 persen, sedangkan 75 persen penanganannya dengan cara '*composting*' dan daur ulang, sisanya baru dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Paradigma baru dalam suatu pembangunan adalah lebih mengutamakan perencanaan dari bawah (*bottom-up*) untuk menghasilkan partisipasi maksimal dari masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan. Proses pembangunan yang sebenarnya, haruslah merupakan perubahan sosial budaya. Agar pembangunan menjadi proses yang dapat bergerak maju sendiri (*self sustaining process*) tergantung pada manusia dan struktur sosialnya. Demikian juga masalah pengelolaan sampah di perkotaan, apabila menginginkan dapat terselesaikan secara mendasar, maka masyarakat harus diberdayakan secara optimal. Oleh karena masalah sampah plastik menjadi permasalahan terutama di kota-kota besar, maka masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya penanganan sampah plastik tersebut.

Terkait dengan hal tersebut KLHK telah berupaya mengurangi sampah plastik dengan program uji coba kantong plastik berbayar. Pemerintah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar guna mengurangi pencemaran lingkungan dari sampah plastik. Program diuji coba mulai 21 Februari 2016 bersamaan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Dengan adanya kantong plastik berbayar, diharapkan masyarakat akan membawa kantong belanjanya

² Trisyanti Dini, Ova Candara Dewi, Widita Vidyaningrum, Wulansary. *Jalan Terjal Bersihkan Negeri, Fakta Sampah dan 12 Kisah Terbaik Pengelolaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Sendang Bumi Wastama, 2014.

³ Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 10 Juni 2015, Dialog Penanganan Sampah Plastik, (*online*), (<http://www.menlh.go.id/rangkaian-hlh-2015-dialog-penanganan-sampah-plastik/>), diakses tanggal 2 Oktober 2016).

⁴ CNN Indonesia, 23 Februari 2016, Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Ke-dua Dunia, (*online*), (<http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160222182308-277-112685/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-dua-dunia/>), diakses tanggal 2 Oktober 2016).

sendiri, tidak sembarang membuang kantong plastik yang selama ini sudah diberikan cuma-cuma oleh supermarket/pedagang retail lainnya.

Namun kebijakan kantong plastik berbayar tersebut saat ini masih dalam taraf uji coba. Beberapa kota telah melakukan ujicoba tersebut, dengan kisaran harga yang berbeda-beda. Namun karena belum ada payung hukum yang mengikat, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan kebijakan kantong plastik berbayar saat ini diserahkan ke masing-masing peritel modern di Indonesia. Hal ini seiring keluarnya surat edaran (SE) kedua dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyatakan mekanisme penerapan kebijakan tersebut diserahkan pada masing-masing pemerintah daerah.⁵

B. Perumusan Masalah

Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah sampah plastik. Mengingat, lebih dari satu juta kantong plastik digunakan setiap menitnya, dan 50 persen dari kantong plastik tersebut dipakai hanya sekali lalu langsung dibuang. Dari angka tersebut, hanya sekitar lima persen saja yang benar-benar di daur ulang. Namun efektivitas kebijakan tersebut masih banyak dipertanyakan. KLHK sendiri belum dapat memperkirakan berapa penurunan penggunaan kantong plastik dengan adanya uji coba plastik berbayar diterapkan pada 21 Februari 2016 tersebut.

Sedangkan dunia usaha yang selama ini memberikan kantong plastik sebagai kantong belanja secara gratis, nampaknya masih menunggu aturan yang hendak ditetapkan secara resmi oleh pemerintah baik dalam bentuk PP, Permen maupun Perda. SE yang telah dikeluarkan KLHK belum dapat menjadi acuan tetap bagi Aprindo untuk mengimplementasikan kebijakan kantong plastik berbayar ini di semua ritel yang ada di Indonesia.

Sementara itu, masyarakat yang selama ini terkena langsung kebijakan program tersebut dengan keharusan untuk turut membayar kantong plastik, merupakan subjek yang perlu dikaji lebih mendalam. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat tidak saja menjadi objek pembangunan, namun juga diharapkan turut mempunyai kepedulian dan dapat berpartisipasi aktif khususnya dalam kebijakan plastik berbayar tersebut, dan umumnya dalam upaya pengurangan jumlah sampah plastik. Belum

diketahui, apakah kebijakan pemerintah dalam implementasinya terkait plastik berbayar tersebut efektif atau tidak dalam upaya mengurangi sampah plastik. Atau bisa jadi karena alasan kepraktisan masyarakat justru lebih memilih membayar kantong plastik ketimbang membawa tas belanja sendiri. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan sampah plastik merupakan hal yang menjadi tujuan dalam implementasi kebijakan tersebut. Sehingga persepsi masyarakat terkait penanganan sampah, dan berikutnya persepsi terhadap kantong plastik berbayar perlu dikaji secara lebih mendalam.

Di samping persepsi masyarakat, besaran harga untuk tiap kantong plastik juga bisa sangat bervariasi. Sebaiknya tidak terlalu murah, sehingga tidak timbul perubahan perilaku dari masyarakat dalam penggunaan kantong plastik. Tapi juga tidak terlalu mahal, sehingga akan sangat membebani konsumen, dan juga masyarakat pada umumnya. Dengan demikian kesanggupan masyarakat akan jumlah harga yang bersedia mereka keluarkan untuk satu buah kantong plastik saat berbelanja adalah hal yang perlu diketahui juga.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui "persepsi masyarakat terkait kebijakan kantong plastik berbayar, dan besaran nominal kesediaan masyarakat untuk membayar kantong plastik tersebut."

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk:

1. Mengetahui persepsi masyarakat terkait kebijakan kantong plastik berbayar; dan
2. Mengetahui besaran kesediaan masyarakat untuk membayar (*willingness to pay*) kantong plastik berbayar.

Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik, yang kemudian dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi program pengelolaan sampah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Lebih lanjut lagi bagi DPR RI, tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran di lapangan dalam implementasi serta pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

D. Kerangka Pemikiran

1. Pengelolaan Sampah

Sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang. Maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa,

⁵ Liputan6.com, 13 Juli 2016, Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Sudah Berakhir?, (*online*), (<http://bisnis.liputan6.com/read/2551446/kebijakan-kantong-plastik-berbayar-sudah-berakhir>, diakses tanggal 2 Oktober 2016).

sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.⁶ Definsi lainnya sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat atau setengah padat, yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁷ Sedangkan berdasarkan lokasinya, sampah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: sampah kota (urban), yaitu sampah yang terkumpul di kota-kota besar dan sampah daerah, yaitu sampah yang terkumpul di daerah-daerah di luar perkotaan, misalnya di desa, di daerah permukiman dan di pantai.⁸

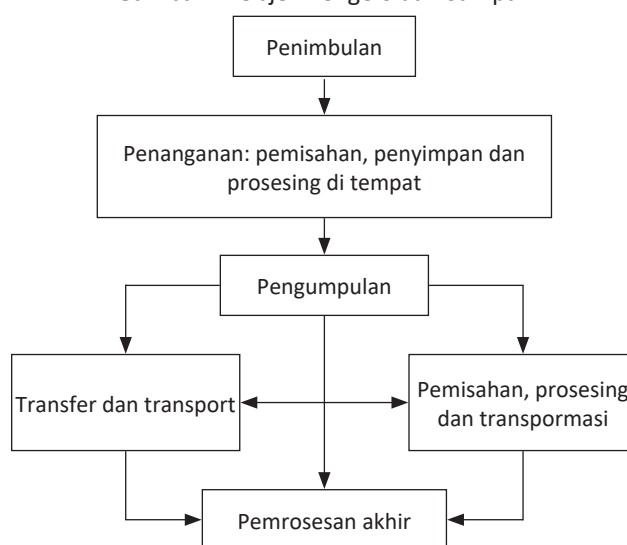
Pengelolaan sampah didefinisikan adalah semua kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat.⁹

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan meliputi: pembatasan timbulnya sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan meliputi: pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metoda dan keahlian khusus untuk masing masing jenis zat. Pengelolaan sampah adalah perlakuan terhadap sampah yang bertujuan untuk memperkecil dan menghilangkan masalah lingkungan yang dapat ditimbulkannya dalam kaitannya dengan lingkungan.¹⁰

Cara pengelolaan sampah sangat beragam, tergantung pihak yang menanganinya dan pihak-pihak tersebut memiliki teknik penanganan yang berbeda-beda. Sampah yang terkelola dengan baik akan selalu berputar dan tidak dibiarkan mengggung pada satu lokasi saja. Secara umum pengelolaan sampah digambarkan dalam teknik operasional yang terdiri dari kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah, yang harus dilakukan secara terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Teknis operasional persampahan meliputi: pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir (lihat Gambar 1).

Gambar 1. Objek Pengelolaan Sampah



Menurut SK SNI T-13-1990-F, pada dasarnya sistem pengelolaan sampah perkotaan dilihat sebagai komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, saling berinteraksi, dan saling berhubungan satu sama lain. Kelima aspek tersebut merupakan prasyarat awal agar manajemen persampahan dapat terlaksana dengan baik. Satu aspek dengan aspek lainnya terkait erat dan saling mendukung. Kelembagaan berfungsi sebagai penggerak dan pelaksana, sehingga seluruh sistem bisa beroperasi dengan baik. Pembiayaan yang meliputi anggaran dan sumber dana, utamanya dapat menyokong kebutuhan operasional.

Terkait dengan pengelolaan sampah plastik, sampah plastik merupakan sampah yang paling banyak dibuang oleh manusia karena banyak orang yang menggunakan plastik untuk keperluannya sehari-hari entah itu perorangan, toko, maupun perusahaan besar. Pembuangan sampah-sampah plastik kedalam air dan tanah telah menambah tingkat kesengsaraan alam. Hal ini dikarenakan sampah plastik terbuat dari bahan anorganik. Bahan-bahan anorganik tersebut sangat sulit dan tidak mungkin

⁶ Azrul Azwar, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1990.

⁷ Robert J. Kodoatie, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

⁸ Soewedo Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1983.

⁹ Sanitasi.Net, (tanpa tahun), *Dasar-dasar Pengelolaan Sampah*, (online), (<http://www.sanitasi.net/dasar-dasar-sistem-pengelolaan-sampah.html>), diakses tanggal 10 September 2015).

¹⁰ Vindhya Tyas Restianingati, "Efektivitas Program Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Komunitas di Kota Surabaya" *Skripsi* tidak diterbitkan, Ilmu Administrasi Negara FISIP UNAIR, Surabaya, 2009.

diuraikan oleh bakteri pengurai. Apabila ditimbun dalam tanah, butuh waktu berjuta-juta tahun hingga sampah plastik tersebut dapat diuraikan. Dan apabila dibakar selain berpotensi mengeluarkan dioksin yang berbahaya bagi kesehatan, juga residu plastik akan menjadi gumpalan dan butuh waktu lama untuk mengurainya.

Sampah plastik sebenarnya terdiri dari beberapa jenis. Sebagian dapat diolah kembali menjadi beberapa macam produk. Namun instansi penyedia jasa daur ulang (*Plastic Factories*) tidak begitu saja menerima limbah plastik untuk didaur ulang. Mereka memiliki standar yang bervariasi. Tipe-tipe plastik yang dapat didaur ulang antara lain: *Polyethylene Terephthalate* (PET, PETE) PET, biasanya dipergunakan sebagai botol minuman (air mineral, jus, *soft drink*, minuman olah raga) tetapi tidak untuk air hangat atau panas. Serpihan dan pelet PET yang telah dibersihkan dan didaur ulang dapat digunakan untuk membuat serat benang karpet, fiberfill, dan geotextile. Kemudian jenis *High Density Polyethylene* (HDPE). HDPE dapat digunakan untuk membuat berbagai macam tipe botol. Botol-botol yang tidak diberi pigmen bersifat tembus cahaya, kaku, dan cocok untuk mengemas produk yang memiliki umur pendek seperti susu. Karena HDPE memiliki ketahanan kimiawi yang bagus, plastik tipe ini dapat digunakan untuk mengemas deterjen dan *bleach*. Hasil daur ulangnya dapat digunakan sebagai kemasan produk non-pangan seperti shampo, kondisioner, pipa, ember, dll. Begitu juga dengan jenis *Low Density Polyethylene* (LDPE) Biasa dipakai untuk tempat makanan dan botol-botol. Barang-barang dengan kode ini dapat didaur ulang dan baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat tidak dapat di hancurkan tetapi tetap baik untuk tempat makanan.¹¹

Sedangkan kantong plastik biasanya terbuat dari *Polyethene* (PE), suatu bahan *thermoplastic* yang baru bisa terurai di alam dalam waktu 500-1.000 tahun, sehingga jika tercecer di tanah akan merusak lingkungan, menghambat peresapan air, menyebabkan banjir, dan merusak kesuburan tanah. Lebih dari 60 juta ton bahan ini diproduksi setiap tahun di seluruh dunia terutama menjadi kantong plastik. Dalam satu tahun, diperkirakan 1 triliun kantong plastik digunakan oleh dunia. Setiap orang menggunakan sekitar 170 kantong plastik tiap tahun. Hanya 1% kantong plastik bekas yang dapat didaur ulang, terutama karena sulitnya memilah berbagai jenis plastik yang digunakan dan tak sebandingnya

biaya daur ulang dengan harga jualnya, sehingga hampir semua kantong plastik menjadi sampah. Bahkan sekitar 3% plastik di dunia berakhir sebagai sampah yang terapung-apung di permukaan air, termasuk di laut yang menyebabkan kematian banyak ikan paus dan penyu karena sampah plastik tersangkut di pencernaan mereka.¹²

2. Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik antara lain: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, dan penilaian/evaluasi kebijakan.¹³ Kebijakan publik terkait pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi efek negatif dari sampah. Kebijakan dapat diterapkan mulai dari sampah tersebut ditimbulkan, proses pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir. Kebijakan pun dapat diterapkan untuk berbagai jenis sampah. Formulasi kebijakan untuk sampah organik dapat berbeda dengan formulasi sampah anorganik. Demikian juga legitimasi kebijakan untuk sampah berbahaya dan beracun berbeda dengan formulasi sampah yang tidak berbahaya dan beracun.

Berbagai negara telah menerapkan berbagai kebijakan dalam upaya mengurangi timbulan sampah yang berasal dari kantong plastik. Di negara-negara maju, penggunaan kantong plastik belanja di toko dan supermarket mulai dibatasi dan digantikan dengan kantong kain. Di San Francisco (AS), toko dan supermarket yang masih menyediakan kantong plastik dikenakan denda \$100 untuk pelanggaran pertama kali, dan meningkat denda \$200 untuk pelanggaran berikutnya dan jika masih melanggar dikenakan denda \$500. Di Australia, toko-toko menjual tas belanja dari bahan kain dengan harga yang sangat murah namun bisa dipakai berkali-kali. Di Perancis, supermarket besar "memaksa" konsumennya untuk membeli tas kain ramah lingkungan. Sedangkan di Inggris, beberapa supermarket besar memberi *discount* khusus senilai 1-4 Poundsterling bagi pembeli yang membawa tas sendiri dari rumah.¹⁴

¹¹ Chandra Febiansyah, 2 Desember 2012, Tipe-tipe Plastik yang Dapat Diolah, (*online*), (<https://chandrafebiansyah.wordpress.com/2012/12/02/tipe-tipe-plastik-yang-dapat-diolah/>), diakses tanggal 19 November 2016).

¹² PemanasanGlobal.Net, (tanpa tahun), Ada Apa dengan Kantong Plastik, (*online*), (http://www.pemanasnglobal.net/energi/ada_apa_dengan_kantong_plastik.htm), diakses tanggal 19 November 2016.

¹³ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.

¹⁴ *Op.cit.* PemanasanGlobal.Net.

Sementara itu di Indonesia, sesuai Amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, paradigma pengelolaan sampah harus dirubah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang sumberdaya. Pendekatan *end of pipe* diganti dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), tanggung jawab produsen atau *extended producer responsibility* (EPR), daur ulang material (*material recovery*), daur ulang energi (*energy recovery*), pemanfaatan sampah (*waste utilisation*), dan pemrosesan akhir sampah di TPA berwawasan lingkungan. Prinsip tersebut dilaksanakan dari hulu saat barang belum dimanfaatkan, sampai hilir saat barang dan kemasan mencapai akhir masa gunanya.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sampah, pemerintah telah menetapkan target pengurangan dan pengolahan sampah, sampah plastik termasuk di dalamnya, sebesar 20% dari total timbulan sampah pada tahun 2019. Penetapan target tersebut mempertimbangkan (1) Penyusunan skala prioritas jenis sampah plastik apa yang perlu ditangani terlebih (misalnya: kantong plastik, *styrofoam*, bungkus makanan) (2) Jumlah target pengurangan dan daur ulang sampah plastik didasarkan hasil perhitungan realistis, terukur, dan bertahap. (3) Prioritas wilayah pengurangan dan daur ulang sampah plastik.

Terkait hal tersebut, pemerintah sedang melakukan berbagai upaya seperti:¹⁵

1. Pembatasan penggunaan kantong plastik belanja, baik di retailer modern maupun pasar tradisional. Program *green mall* atau *green retailer* bisa menjadi pilihan.
2. Optimalisasi daur ulang sampah plastik yang sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor informal maupun masyarakat.
3. Kemitraan pemerintah dan produsen penghasil barang dan/atau barang dengan kemasan plastik.
4. Sosialisasi program pemilahan dan daur ulang sampah plastik melalui Program Bank Sampah.

Ketentuan mengenai kantong plastik berbayar ini diuraikan dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Dalam surat edaran tersebut, minimal harga satu kantong plastik adalah Rp200,-. Akan tetapi, ada kota yang menerapkan harga di atas harga tersebut, seperti contohnya Balikpapan (yakni seharga Rp.1.500,-).

SE pertama yang dikeluarkan terkait pengurangan kantong plastik adalah Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern ("SE 6/2015"). Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam rangka pengurangan sampah, khususnya sampah kantong plastik, adalah penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di seluruh gerai pasar modern di Indonesia. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu strategi guna menekan laju timbulan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup.

SE 1230/2016 menyebutkan bahwa ketentuan ini menindaklanjuti hasil pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional ("BPKN"), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ("YLKI"), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia ("APRINDO"). Beberapa ketentuan dalam SE 1230/2016 ini antara lain:

1. Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel;
2. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200,- per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3. Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
4. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu;
5. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility, CSR*) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel.

¹⁵ *Op.cit*, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia..

6. Ketentuan ini juga berlaku untuk usaha ritel modern yang bukan anggota APRINDO.

Beberapa Pemerintah Daerah merespons kebijakan tersebut dengan turut menerbitkan SE. Seperti di Balikpapan. Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor: 005/0123/BLH tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Kantong Plastik Berbayar di Kota Balikpapan, sebagai tindak lanjut dari SE 6/2015, mengatur agar usaha ritel menyediakan kantong plastik berbayar dengan harga setara untuk mengolah satu kantong plastik menjadi barang daur ulang yang nilainya disesuaikan dengan ukuran kantong yaitu seharga minimal Rp1.500,-. Jenis plastik yang dijual oleh ritel harus bersifat ramah lingkungan.

Sedangkan di kota lain, yaitu Semarang, dalam Surat Walikota Semarang Nomor: 658.1/517 tanggal 11 Februari 2016 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disebutkan bahwa Kota Semarang mendukung peluncuran Program Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Penerapan kebijakan di Kota Semarang diberlakukan untuk seluruh anggota APRINDO yang diluncurkan pada 21 Februari 2016 dengan membagikan secara gratis Tas Belanja Ramah Lingkungan kepada konsumen mulai tanggal 21 sampai 29 Februari 2016, untuk selanjutnya akan diberlakukan kantong plastik berbayar.¹⁶

SE KLHK yang pertama, uji coba penerapan kantong plastik berbayar dilakukan dari tanggal 21 Februari hingga 31 Mei 2016. Kemudian SE kedua baru diterbitkan KLHK pada 8 Juni 2016. Namun SE kedua KLHK tidak sesuai dengan harapan para pengusaha ritel. Hal tersebut karena dalam SE lanjutan mekanisme kebijakan plastik berbayar diserahkan pada masing-masing Pemerintah Daerah. Padahal sejak awal peritel tidak setuju jika mekanisme tersebut dan lebih memilih mekanisme diserahkan pada kesepakatan peritel. Sementara itu payung hukum kebijakan plastik berbayar pun belum ditetapkan. Selama ini bentuknya baru berupa Surat Edaran, KLHK belum menerbitkan Permen, sehingga Pemerintah Daerah pun belum menerbitkan Perda untuk mengimplementasikannya. Dengan demikian, sejak 1 Juni lalu, berdasarkan imbauan Aprindo, ketentuan kantong plastik berbayar di gerai-gerai supermarket/minimarket sudah tidak berlaku lagi.¹⁷ Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) memberhentikan program kantong

plastik berbayar yang dijalankan toko ritel modern di seluruh Indonesia, terhitung 1 Oktober 2016 sampai dengan diterbitkannya peraturan pemerintah yang berkekuatan hukum. Langkah tersebut diambil menyusul adanya pro-kontra yang terjadi di berbagai daerah.

Penerapan kembali aturan kantong plastik berbayar masih menunggu keluarnya Keputusan Menteri (Kepmen) LHK sebagai payung hukum. Saat ini aturan tersebut masih digodok oleh kementerian tersebut. Hingga Oktober 2016 draft Kepmen tersebut telah selesai disusun. Namun saat ini KLHK masih harus membahas dan meminta masukan kepada pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Pemerintah Daerah (Pemda), dan para pelaku usaha.¹⁸

Kajian terus dilakukan untuk menentukan harga kantong plastik tersebut. KLHK melakukan survei secara *online* dan survei di lapangan. Dari survei ini, diharapkan akan muncul masukan terkait harga ideal per item kantong plastik. Harga kantong plastik yang ditetapkan tersebut juga akan berlaku secara nasional. Hal ini berbeda ketika saat uji coba di mana masing-masing daerah menentukan sendiri harga kantong plastik berbayar tersebut.¹⁹

Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi KLHK, terlihat penurunan penggunaan kantong plastik sebesar 25-30 persen selama masa uji coba tiga bulan pertama, di mana 87,2 persen masyarakat menyatakan dukungannya dan 91,6 persen bersedia membawa kantong belanja sendiri dari rumah.

Berdasarkan Surat Edaran KLHK, uji coba kantong plastik berbayar diperpanjang. Waktu perpanjangan berlaku hingga terbitnya Peraturan Menteri (Permen) LHK tentang pembatasan kantong plastik. Hasil uji coba akan digunakan sebagai pedoman penyusunan aturan soal plastik berbayar. Pedoman itu akan digunakan untuk pemerintah daerah karena berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008, tanggung jawab penanganan sampah merupakan kewenangan pemerintah daerah. KLHK akan melakukan evaluasi ujicoba kebijakan ini pada akhir 2016.²⁰

¹⁶ HukumOnline.com, 26 Februari 2016, Haruskah Membayar Kantong Plastik di Supermarket, (*online*), (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c772772b6e0/haruskah-membayar-kantong-plastik-di-supermarket>, diakses tanggal 2 Oktober 2016).

¹⁷ Suara Merdeka, 22 Juni 2016, Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Dinilai Tidak Efektif, (*online*), (<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kebijakan-kantong-plastik-berbayar-dinilai-tak-efektif/>, diakses tanggal 2 Oktober 2016).

¹⁸ Liputan6.com, 9 Oktober 2016, Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Kembali Berlaku?, (*online*), (<http://bisnis.liputan6.com/read/2621729/kebijakan-kantong-plastik-berbayar-kembali-berlaku>, diakses tanggal 18 November 2016).

¹⁹ Liputan6.com, 9 Oktober 2016, Kembali Berbayar, Berapa Harga Kantong Plastik?, (*online*), (<http://bisnis.liputan6.com/read/2621772/kembali-berbayar-berapa-harga-kantong-plastik>, diakses 20 Oktober 2016).

²⁰ Tempo.co, 15 Juli 2016, KLHK Evaluasi Uji Coba Kantong Plastik Berbayar Akhir 2016, (*online*), (<https://m.tempo.co/read/news/2016/07/15/078787886/klhk-evaluasi-uji-coba-kantong-plastik-berbayar-akhir-2016>, diakses tanggal 20 November 2016).

3. *Willingness to Pay*

Secara umum, nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Secara formal, konsep ini disebut keinginan membayar atau *Willingness to Pay* (WTP) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Dengan menggunakan pengukuran ini, nilai ekologis ekosistem bisa diterjemahkan ke dalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter barang dan jasa.²¹

WTP pada umumnya diartikan sebagai kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan (dalam bentuk uang) atas jasa yang diperolehnya. WTP juga diartikan sebagai jumlah maksimum yang akan dibayarkan konsumen untuk menikmati peningkatan kualitas.²²

Keinginan membayar juga dapat diukur dalam bentuk kenaikan pendapatan yang menyebabkan seseorang berada dalam posisi *indifferent* terhadap perubahan eksogenous. Perubahan eksogenous ini bisa terjadi karena perubahan harga (misalnya akibat sumber daya makin langka) atau karena perubahan kualitas sumberdaya. WTP dapat juga diartikan sebagai jumlah maksimal yang seseorang bersedia bayarkan untuk menghindari terjadinya penurunan terhadap sesuatu.²³ Dalam kaitannya dengan lingkungan, *WTP* atau kesediaan untuk membayar adalah kesediaan individu untuk membayar terhadap suatu kondisi lingkungan atau penilaian terhadap sumberdaya alam dan jasa alami dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan. Dalam WTP dihitung seberapa jauh kemampuan setiap individu atau masyarakat secara agregat untuk membayar atau mengeluarkan uang dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan agar sesuai dengan kondisi yang diinginkan. WTP merupakan nilai kegunaan potensial dari sumberdaya alam dan jasa lingkungan.²⁴

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penghitungan WTP untuk menghitung peningkatan atau kemunduran kondisi lingkungan adalah:

1. Menghitung biaya yang bersedia dikeluarkan oleh individu untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan karena adanya suatu kegiatan pembangunan.
2. Menghitung pengurangan nilai atau harga dari suatu barang akibat semakin menurunnya kualitas lingkungan.
3. Melalui suatu survei untuk menentukan tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar dalam rangka mengurangi dampak negatif pada lingkungan atau untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik.

Penghitungan WTP dapat dilakukan secara langsung (*direct method*) dengan melakukan survei, dan secara tidak langsung (*indirect method*), yaitu penghitungan terhadap nilai dari penurunan kualitas lingkungan yang telah terjadi. Dalam penelitian ini penghitungan WTP dilakukan secara langsung (*direct method*), dengan cara survei dan melakukan wawancara dengan masyarakat.

Besaran WTP dapat ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Kondisi internal setiap individu seperti usia, tingkat pendidikan, pendapatan dan perilaku terhadap lingkungan turun mempengaruhi besaran WTP.²⁵ Demikian juga persepsi masyarakat terhadap lingkungan turut mempengaruhi seberapa besar kesediaan masyarakat dapat membayar jasa lingkungan yang diterimanya.

Sikap dan perilaku seseorang terhadap sesuatu sangat ditentukan oleh bagaimana pandangannya terhadap sesuatu itu. Apabila sesuatu hal dipandang sebagai berguna dan penting, maka sikap dan perilaku terhadap sesuatu itu lebih banyak bersifat menghargai. Sebaliknya jika sesuatu hal dipandang dan dipahami sebagai sesuatu yang tidak berguna dan tidak penting, maka sikap dan perilaku yang muncul lebih banyak bersifat mengabaikan, bahkan merusak. Manusia memiliki pandangan tertentu pada lingkungan, dimana pandangan itu telah menjadi landasan bagi tindakan dan perilaku manusia terhadap alam. Demikian juga persepsi, sikap, prasangka, dan perilaku saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain.²⁶

²¹ Boby Sumakul, "Valuasi Ekonomi Kawasan Karst Gunung Sewu, Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

²² Whitehead, John C. 2005, dalam Julien dan Kasyful Mahalli, "Analisis Ability To Pay dan Willingness To Pay Pengguna Jasa Kereta Api Bandara Kualanamu (Airport Railink Service)", *jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol 2, No.3, 2015, hal 169.

²³ *Opcit*, Boby Sumakul.

²⁴ Hanley, N. and C.L. Spash. (1993). dalam Gusty Elfa M. Simanjuntak, "Analisis *Willingness To Pay* Masyarakat Terhadap Peningkatan Pelayanan Sistem Penyediaan Air Bersih Dengan WSLIC (*Water Sanitation For Low Income Community*) (Studi Kasus Desa Situdaun, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Departemen Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2009.

²⁵ Nugroho Joko Prasetyo, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Willingness To Pay Perbaikan Kualitas Lingkungan Desa-Desa Wisata Di Kabupaten Sleman Paska Erupsi Merapi Pendekatan Contingent Valuation Method," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012.

²⁶ Mufti Abrori, (tanpa tahun), Makalah Manusia dan Lingkungan Ilmu Sosial Budaya Dasar, (*online*), (http://www.academia.edu/8397048/Makalah_Manusia_dan_Lingkungan_ilmu_sosial_budaya_dasar, diakses tanggal 24 Februari 2016).

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihata, pendengar, peraba, perasa, dan pencium. Persepsi dan perilaku merupakan dua aspek yang mempengaruhi gambaran diri seseorang. Persepsi merupakan pandangan atau konsep yang dimiliki seseorang mengenai sesuatu hal sedangkan perilaku adalah tindakan atau aspek dinamis yang muncul dari persepsi tersebut.²⁷

Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah nilai-nilai dari dalam diri setiap individu yang diperoleh dengan hal-hal yang diterima dirinya. Adapun faktor internal yang memengaruhi persepsi seseorang diantaranya adalah motif, minat, harapan, sikap, pengetahuan, dan pengalaman. Sedangkan faktor eksternal adalah nilai-nilai dari luar setiap diri individu yang dapat mempengaruhi persepsi misalnya objek dan situasi.²⁸ Persepsi tersebut dapat mempengaruhi bentuk tingkah laku atau perilaku individu dalam kehidupan sehari-harinya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Perangkat penelitian berupa kuesioner disebarkan kepada 38 responden yang bertempat tinggal di DKI Jakarta dan Kota Bandung. Untuk menentukan sampel dari populasi dapat digunakan perhitungan maupun acuan tabel yang dikembangkan para ahli. Secara umum, untuk penelitian korelasional jumlah sampel minimal untuk memperoleh hasil yang baik adalah 30. Acuan umum untuk menentukan ukuran sampel, dimana ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian.²⁹ Besaran atau ukuran sampel ini sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan pada penelitian. Namun, dalam hal tingkat kesalahan, pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 5% (0,05).

Penelitian dilakukan pada tanggal 6 s.d. 10 Juni 2016 di Jakarta dan tanggal 18-19 Juni di Kota Bandung. Kedua kota tersebut dipilih mengingat termasuk kota metropolitan dan kota besar dengan jumlah sampah yang sangat besar yang perlu penanganan sangat intensif. Jumlah penduduk dan luas area di

Jakarta jauh lebih besar daripada di Kota Bandung, sehingga waktu penelitian di DKI Jakarta dilakukan lebih lama. Di kedua kota tersebut, kebijakan kantong plastik berbayar sudah diujicobakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk segera membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang penerapan kantong plastik berbayar. Dan apabila setelah dikaji menunjukkan hasil yang efektif, maka Pergub tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perda.³⁰ Sementara itu Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLH) Kota Bandung memberlakukan tarif Rp500 per kantong plastik mulai tanggal 21 Februari 2016. Penerapannya dilakukan pada perusahaan retail.³¹ Dengan demikian, diasumsikan masyarakat di kedua kota tersebut sudah mengetahui kebijakan tersebut.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Probability Sampling*. *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pemilihan responden dilakukan secara *random sampling*. Sampel di kedua kota dipilih secara acak, dengan responden diasumsikan masyarakat yang terbiasa berbelanja baik pasar tradisional maupun pasar modern/supermarket dengan menggunakan kantong plastik. Adapun rincian kuesioner terdiri dari pertanyaan yang menyangkut identitas responden (jenis kelamin, usia, pendidikan), tingkat pendapatan, perilaku dalam berbelanja (tempat berbelanja, frekuensi berbelanja, dan jumlah nominal yang dibelanjakan). Setelah itu ditanyakan pula persepsi responden terkait pengelolaan sampah, persepsi tentang kebijakan plastik berbayar, dan juga besaran WTP. Metode Pertanyaan Terbuka (*Open-Ended Question*) digunakan untuk mendapatkan besaran WTP dimana responden ditanyakan berapa harga yang ideal untuk 1 buah kantong plastik. Dan secara terbuka pula responden ditanyakan alasan memilih besaran tersebut.

Pengukuran nilai WTP menggunakan metode *stated preference*. Metode *stated preference* mengukur kesediaan membayar responden dengan menanyakan berapa jumlah yang responden bersedia untuk membayar. Penilaian responden terhadap

²⁷ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

²⁸ P. S. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

²⁹ Roscoe (1975) dalam Uma Sekaran, *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

³⁰ GDKP, 13 Oktober 2016, DKI Jakarta Keluarkan Pergub tentang Kantong Plastik Berbayar, (*online*) (<http://dietkantongplastik.info/2016/10/13/dki-jakarta-keluarkan-pergub-soal-kantong-plastik-berbayar/>, diakses 21 Oktober 2016).

³¹ GDKP, 21 September 2016, Warga Bandung Nilai Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Kurang Efektif, (*online*) (<http://dietkantongplastik.info/2016/09/21/warga-bandung-nilai-kebijakan-kantong-plastik-berbayar-kurang-efektif/>, diakses 21 Oktober 2016).

situasi tertentu dapat diketahui dengan memberikan pernyataan yang dapat dinilai responden baik secara langsung maupun melalui *ranking, rating* atau *choice*.

Nilai WTP masing-masing responden yaitu berupa nilai maksimum rupiah yang bersedia dibayarkan oleh responden untuk 1 kantong plastik, diolah untuk mendapatkan nilai rata-rata (*mean*) dari nilai WTP tersebut, dengan rumus :

$$MWTP = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n WTP_i \dots\dots\dots (1)$$

Dimana : MWTP = Rata-rata WTP
 n = Ukuran sampel
 WTP_i = Nilai WTP Maksimum responden ke i

Selanjutnya, WTP masyarakat terkait dengan kebijakan kantong plastik berbayar ini dikaji lebih lanjut dengan analisis regresi berganda dengan program *Microsoft Excel* dan *Minitab for Windows Release 14*. untuk mencari hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi WTP dengan besaran WTP-nya dalam sebuah persamaan matematis. Analisis lebih lanjut terhadap hasil kuantitatif dilakukan dengan wawancara dan pertanyaan terbuka kepada responden terkait kebijakan kantong plastik berbayar tersebut.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Responden

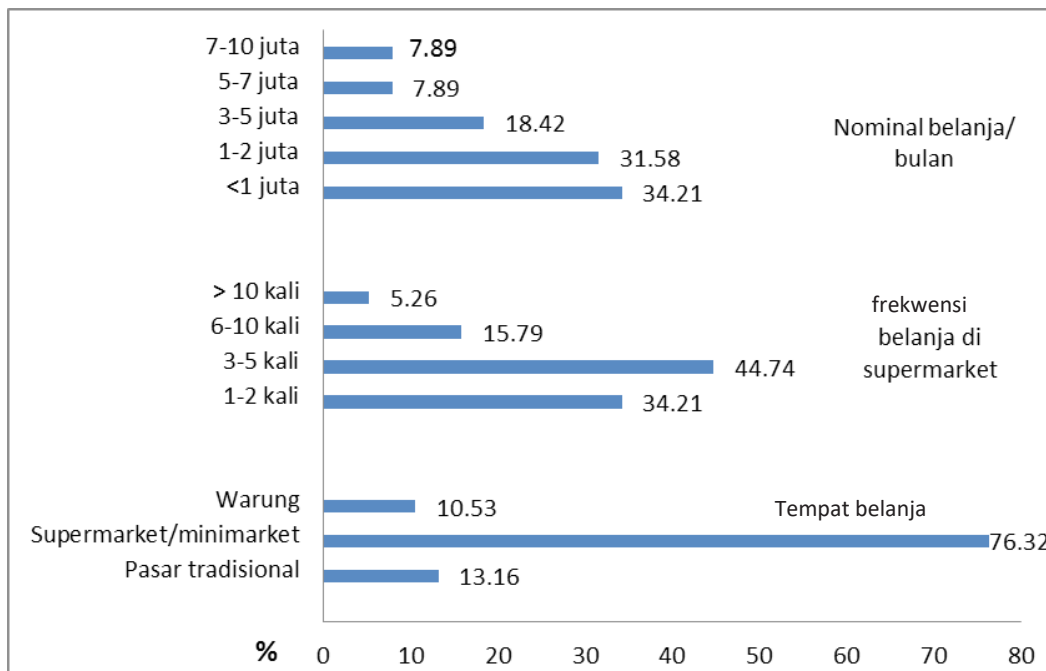
Responden pada penelitian ini terdiri dari 38 orang, 61% laki-laki dan 39% perempuan. Tingkat pendidikan responden beragam terdiri dari 55% pascasarjana, 29% SLTA dan 16% sarjana. Usiapun beragam, dengan responden terbanyak berada pada usia 31-40 tahun (47%), dan kemudian usia 41-50 tahun sebanyak 24%. Sedangkan jumlah penghasilan diklasifikasikan berdasarkan nominal tertentu, dimana responden dengan penghasilan antara 11-20 juta rupiah mempunyai persentase tertinggi (45%), disusul kemudian dengan pengasilan kurang dari 3 juta rupiah (sebanyak 24%). Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa responden cenderung berpendidikan tinggi, berada pada rentang usia dewasa, dengan penghasilan mayoritas responden jauh lebih besar daripada rata-rata Upah Minimum Regional di lokasi masing-masing responden, yakni DKI Jakarta dan Kota Bandung.

Adapun perilaku konsumsi responden dapat dilihat pada Grafik 2. Sebagian besar responden berbelanja bulanan kurang dari 1 juta (34%) dan antara 1-2 juta (31,58%) per bulan. Frekuensi belanja di supermarket sebagian besar antara 3-5 kali sebulan (44,74%), atau jika dirata-rata sekitar 1x/minggu. Dan sebagian besar responden (76,32%) lebih memilih supermarket/minimarket sebagai tempat belanja bulanan dibanding dengan pasar tradisional ataupun warung. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa mayoritas responden sering

Grafik 1. Gambaran Umum Responden



Grafik 2. Pola Konsumsi Responden



berbelanja di supermarket/minimarket, sehingga dapat diasumsikan sebagian besar responden sudah mengetahui kebijakan pemerintah tentang kantong plastik berbayar.

B. Persepsi tentang Sampah dan Kantong Plastik Berbayar

Berdasarkan pengolahan data hasil kuesioner, persepsi masyarakat terhadap sampah, supermarket dan kebijakan kantong plastik berbayar adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persepsi Masyarakat terhadap Sampah (%)

No	Pertanyaan *)	4	3	2	1
Persepsi terhadap sampah					
1.	Sampah sangat mengganggu lingkungan, baik dari segi kebersihan, estetika dan kesehatan	84.21	15.79	0	0
2.	Diantara sampah yang dihasilkan rumah tangga, sampah plastik adalah yang paling banyak	18.42	63.16	7.89	10.53
3.	Menurut saya, diantara semua sampah yang dihasilkan rumah tangga, sampah plastik perlu dikelola dengan lebih baik dan serius karena dampaknya yang besar bagi lingkungan	73.68	23.68	2.63	0

No	Pertanyaan *)	4	3	2	1
Persepsi terhadap supermarket dan plastik berbayar					
1.	Berbelanja di supermarket/minimarket lebih menyenangkan dan efektif menurut saya daripada di pasar tradisional atau warung	23.68	34.21	26.32	15.79
2.	Saya setuju apabila dikenakan tarif bagi kantong plastik belanja dari supermarket	31.58	15.79	13.16	39.47
3.	Demikian juga, saya setuju apabila dikenakan tarif terhadap kantong plastik belanja di pasar tradisional atau warung	21.05	10.53	21.05	47.37

*) Keterangan: 4. Sangat setuju 3. Setuju
2. Agak setuju 1. Tidak setuju

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden (84,21%) sangat setuju bahwa sampah sangat mengganggu lingkungan, dan responden juga setuju bahwa sampah rumah tangga sebagian besar menghasilkan sampah plastik. Oleh karena itu sebagian besar responden (73,68%) sangat setuju apabila sampah plastik tersebut dikelola dengan baik dan lebih serius agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan.

Dengan demikian, sebagian besar responden sudah mempresepsikan bahwa sampah (khususnya

sampah plastik) sebagian besar bersumber dari rumah tangga dan harus dikelola dengan baik. Berdasarkan wawancara, responden menyatakan bahwa bentuk pengelolaan sampah anorganik tersebut dapat dilakukan dengan pemilahan dan daur ulang. Namun responden juga menyatakan bahwa sampah plastik jenis tertentu saja yang dapat didaur ulang. Sementara itu sampah yang berupa kantong plastik sebagai tempat belanja dari supermarket tidak dapat didaur ulang dan tidak diambil oleh pemulung. Oleh karena itu, biasanya responden membuang sampah tersebut ke tempat sampah atau jika jenis kantong plastiknya lebih tebal biasanya disimpan, untuk tempat penyimpanan/ membawa barang tertentu, atau dimanfaatkan untuk kantong sampah. Pengurangan penggunaan sampah plastik juga merupakan alternatif lain yang dikemukakan responden agar sampah plastik yang selama ini sudah dihasilkan tidak makin mencemari lingkungan. Dengan demikian persepsi responden terhadap sampah plastik, dampaknya dan pengelolaannya sudah baik. Hal ini berkesesuaian dengan tingkat pendidikan responden yang mayoritas berpendidikan tinggi yang diasumsikan berpengetahuan luas, berusia dewasa sehingga mempunyai pola pikir yang objektif, dan memiliki penghasilan yang relatif tinggi. Penghasilan yang tinggi tersebut biasanya berkorelasi dengan kebutuhan akan lingkungan yang lebih bersih dan tertata.

Sedangkan persepsi responden terhadap belanja di supermarket masih cenderung merata. 34,21% responden setuju belanja di supermarket lebih efektif daripada belanja di warung ataupun pasar tradisional, sementara sebagian besar lainnya (26,32%) agak setuju dengan hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa supermarket/minimarket tidak selalu dipersepsikan sebagai tempat belanja yang efektif dan menyenangkan bagi sebagian responden.

Terkait tarif yang dikenakan terhadap kantong plastik di supermarket, 39,47% responden tidak setuju akan pengenaan tarif tersebut, sementara itu 31,58% responden sangat setuju akan hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden yang setuju dan tidak setuju akan kebijakan kantong plastik berbayar jumlahnya relatif sama. Responden yang tidak setuju akan kebijakan tersebut berpendapat bahwa pengenaan tarif kantong plastik tersebut akan menambah biaya bulanan, tidak efektif dan pengelolaan/peruntukan uang dari pembayaran kantong plastik tersebut juga belum jelas. Responden berpendapat bahwa penggunaan kantong plastik tidak terhindarkan, konsumen berhak mendapatkan secara gratis. Tugas pemerintah untuk mengelola dan menemukan teknologi daur ulang atau menyediakan kantong plastik yang lebih ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau.

Adapun responden yang sangat setuju akan kebijakan kantong plastik berbayar berpendapat

bahwa kebijakan tersebut akan mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan oleh rumah tangga. Untuk menghindari pengenaan biaya pembelian kantong plastik maka responden akan membawa kantong belanja dari rumah masing-masing. Selain itu, berdasarkan responden yang setuju, kebijakan tersebut akan menggugah masyarakat agar lebih menggunakan kantong berbahan plastik secara terkendali. Responden juga berpendapat, apabila kantong plastik masih digratiskan, dikuatirkan tingkat kepedulian masyarakat akan sampah plastik akan semakin berkurang.

Selama ini, ujicoba kantong plastik berbayar baru dilakukan di supermarket/minimarket, belum diujicobakan di pasar tradisional. Oleh karena itu, sebagian besar responden (47,37%) sangat tidak setuju apabila kebijakan kantong plastik berbayar diberlakukan juga di pasar tradisional/warung. Namun masih ada 21,05% responden yang sangat setuju dan agak setuju jika kebijakan tersebut diberlakukan juga di warung/pasar tradisional. Menurut responden, hal tersebut karena pengurangan sampah plastik sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, di setiap sektor, agar pengurangan sampah plastik dapat dilakukan secara optimal. Adapun responden yang sangat tidak setuju apabila kantong plastik berbayar diberlakukan juga di warung dan pasar tradisional, karena menurut mereka, sebagian besar masyarakat yang berbelanja di tempat itu adalah dari golongan menengah ke bawah, dengan demikian masyarakat akan sangat terbebani jika masih harus mengeluarkan uang lagi untuk pembelian kantong plastik.

Selanjutnya responden juga ditanya pengetahuannya tentang kebijakan plastik berbayar, dan persepsi mereka terkait hal itu. Hasil jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Pengetahuan dan Kesiediaan Responden Terkait Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

		Sudah mengetahui (%)	Belum mengetahui (%)	
1	Pengetahuan tentang kebijakan kantong plastik berbayar	92.11	7.89	
		Bersedia (%)	Ragu-ragu (%)	Tidak bersedia (%)
2	Kesiediaan membayar kantong plastik	55.26	7.89	36.84

Berdasarkan tabel tersebut, sebagian besar responden (92,11%) sudah mengetahui tentang kebijakan kantong plastik berbayar. Adapun mereka

mengetahui tentang kebijakan tersebut karena sebagian besar responden pernah berbelanja di supermarket/minimarket dan mereka telah dikenakan tarif kantong plastik tersebut. Pengetahuan dan pengalaman responden saat dikenakan tarif akan kantong plastik tempat membawa barang-barang yang dibelinya, dapat menjadi dasar terhadap persepsi konsumen terkait kebijakan ini.

Pada saat pertama, konsumen secara terpaksa harus membayar kantong plastik, namun berikutnya konsumen dapat memilih membayar, atau membawa kantong belanja sendiri, atau bisa juga menggunakan kardus yang biasanya tersedia di beberapa supermarket besar sebagai wadah belanjanya. Petugas di kasir biasanya selalu menanyakan, apakah konsumen membawa kantong sendiri, atau mau menggunakan kantong yang disediakan supermarket. Dan apabila menggunakan kantong yang ada di supermarket, maka kasir menginformasikan ada biaya yang harus dikeluarkan. Pilihan-pilihan yang diberikan kepada konsumen ini merupakan hal yang positif, dan dapat menggugah pertanyaan lebih lanjut, misalnya: kenapa sekarang ada ketentuan membayar harga tertentu bagi kantong plastik yang biasanya diberikan secara cuma-cuma? atau pertanyaan uang yang terkumpul dari pembelian kantong plastik tersebut digunakan untuk apa?

Hal tersebut sebenarnya merupakan kesempatan yang baik bagi kasir yang berhubungan langsung kepada konsumen untuk menjelaskan program plastik berbayar tersebut, sekaligus mensosialisasikan akan pentingnya pengurangan sampah plastik, apalagi bila disertai dengan poster-poster yang mendukung kampanye pengurangan sampah plastik di area supermarket. Dengan demikian maksud dan tujuan kebijakan dapat diinformasikan dengan baik kepada konsumen. Sayangnya, berdasarkan wawancara kepada beberapa responden, hal tersebut tidak dilakukan oleh kasir yang bertugas. Kasir kadang hanya menginfokan bahwa hal tersebut adalah aturan yang sudah diberlakukan saja, mereka belum dapat menjelaskan secara lebih jauh. Demikian juga, terkait pemanfaatan dana yang terkumpul dari pembelian kantong plastik tersebut untuk hal apa saja, tidak dapat diinformasikan oleh kasir. Nampaknya kasir belum diberi arahan yang memadai terkait kebijakan ini, baik oleh aparat pemerintah maupun oleh pengelola supermarket. Bisa jadi, kebijakan plastik berbayar ini hanya disosialisasikan oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun daerah) kepada kalangan top manajemen di supermarket saja, tetapi informasi dan sosialisasinya tidak sampai kepada level pelaksana di lapangan yang biasanya berhadapan langsung dengan konsumen. Dengan demikian, sebagian konsumen jadi beranggapan bahwa kebijakan kantong plastik

berbayar hanya menguntungkan pihak supermarket saja, dan menambah beban biaya dan pengeluaran bagi konsumen.

Lebih lanjut lagi, setelah konsumen mengetahui adanya kebijakan kantong plastik berbayar, kesediaan mereka membayar kantong plastik tersebut perlu diketahui juga. Berdasarkan kuesioner yang diberikan, lebih dari setengah responden (55,26%) bersedia membayarnya, karena mereka menganggap sampah plastik saat ini jumlahnya sudah sangat banyak, dan belum dikelola dengan baik, adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan kepedulian bagi masyarakat untuk mengurangi atau bahkan mendaur ulang sampah plastiknya. Sedangkan responden yang tidak bersedia membayar kantong plastik, berpendapat bahwa kebijakan tersebut hanya menguntungkan pihak pemilik supermarket saja, dan makin membebani rakyat. Seperti dikemukakan sebelumnya, hal ini dapat terjadi salah satu sebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan informasi terkait tujuan dan alasan utama kebijakan ini diberlakukan. Selain itu, pemanfaatan dana dari pembelian kantong plastik tersebut sejauh ini belum jelas. Apabila diatur dalam payung hukum yang jelas bahwa dana yang terkumpul dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan positif misalnya dalam rangka menjaga kualitas lingkungan, peningkatan pendidikan (misal program beasiswa), atau bantuan kesehatan, maka tentu kesediaan konsumen untuk membayar kantong plastik dapat lebih meningkat.

Selain itu, keengganan konsumen membayar kantong plastik karena ada anggapan bahwa kepedulian terhadap sampah plastik seharusnya adalah kepedulian dan tanggung jawab bersama, jangan hanya menjadi beban konsumen supermarket semata. Oleh karena itu pemerintahlah yang dinilai oleh sebagian konsumen yang paling bertanggung jawab terkait pengelolaan sampah plastik tersebut.

C. Analisis *Willingness to Pay*

Pendapat responden akan besaran tarif yang dikenakan untuk 1 buah kantong plastik sangat beragam. Hampir sebagian besar responden berpendapat bahwa harga Rp.200,- per buah terlalu kecil, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan perubahan sikap bagi konsumen untuk merubah pola konsumsi akan kantong plastik selama ini. Responden lainnya berpendapat, sebaiknya supermarket juga menyediakan pilihan-pilihan jenis kantong belanja yang lebih ramah lingkungan, dengan kisaran harga yang bisa bervariasi, namun masih terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner yang dikumpulkan dari responden, nilai harga ideal untuk tiap kantong plastik sangat bervariasi antara

Rp.25,- sampai dengan Rp.10.000,. Kemudian setelah dihitung dengan menggunakan persamaan 1, nilai WTP rata-rata yang didapatkan adalah sebesar Rp.1.321,71,-. Nilai tersebut jauh di atas harga yang diusulkan/ditetapkan oleh pemerintah saat uji coba kemarin, yakni sebesar Rp.200,-. Harga Rp.200,- memang merupakan harga terendah yang diterapkan di beberapa kota termasuk tempat penelitian ini dilakukan, yakni Jakarta dan Kota Bandung. Adapun beberapa daerah lain seperti Balikpapan, justru ada beberapa supermarket yang menetapkan harga sebesar Rp.1.500,- untuk tiap kantong plastik. Hasil perhitungan WTP rata-rata pada penelitian ini justru mendekati nilai nominal yang diterapkan di Balikpapan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesediaan responden untuk membayar kantong plastik relatif tinggi. Oleh karena itu dapat diasumsikan tingginya WTP dari responden untuk membayar kantong plastik karena persepsi mereka akan pentingnya membatasi jumlah sampah plastik yang dibuang ke lingkungan. Dengan sejumlah nominal uang yang ditetapkan untuk membayar kantong plastik tersebut, responden mengharapkan jasa lingkungan berupa peningkatan kualitas lingkungan yang lebih baik, yang terbebas dari dampak negatif sampah plastik.

Namun besaran WTP yang dipilih oleh masing-masing responden tersebut sangat bergantung pada variable-variabel yang telah disebutkan sebelumnya, antara lain: jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, jumlah penghasilan per bulan, tempat biasanya berbelanja bulanan, dan nominal rata-rata yang dikeluarkan untuk belanja bulanan di supermarket/minimarket. Asumsi yang berlaku dalam variabel ini adalah tinggi rendahnya faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap besaran WTP kantong plastik berbayar.

Persamaan regresi yang digunakan untuk mengestimasi nilai WTP berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas adalah:

$$WTP = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \beta_7X_7 + e_i \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- WTP = Rata-rata WTP responden dalam membayar kantong plastik
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_7$ = Koefisien Regresi
- X_1 = Jenis kelamin
- X_2 = Usia
- X_3 = Pendidikan
- X_4 = Jumlah penghasilan per bulan
- X_5 = Tempat belanja bulanan
- X_6 = Frekuensi belanja di supermarket/minimarket
- X_7 = Rata-rata biaya bulanan yang dibelanjakan di supermarket/minimarket
- i = Responden ke- i
- e = Galat

Variabel yang menjadi telaahan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa klaster. Karena tidak semua variable antara X_1 s.d. X_7 tersebut berupa

angka, maka dilakukan koding dan kuantifikasi dengan diberi angka tertentu agar dapat dihitung nilai regresinya. Pengklasteran dan koding yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Pengkodean Variabel WTP

Variabel	Jenis	Rincian klaster	Koding
X_1	Jenis Kelamin	Laki-laki	1
		Perempuan	2
X_2	Usia (tahun)	<20	1
		21-30	2
		31-40	3
		41-50	4
		51-60	5
		>60	6
X_3	Pendidikan	SLTA	1
		Diploma/sarjana	2
		Pascasarjana	3
X_4	Jumlah penghasilan perbulan	< 3 juta	1
		3-5 juta	2
		6-10 juta	3
		11-20 juta	4
		>20 juta	5
X_5	Tempat belanja bulanan	Pasar tradisional	1
		Warung Super/ minimarket	2
			3
X_6	Frekuensi belanja di supermarket/ minimarket per bulan	1-2 kali	1
		3-5 kali	2
		6-10 kali	3
		>10 kali	4
X_7	Rata-rata biaya bulanan yang dibelanjakan di supermarket/ minimarket	<1 juta	1
		1-2 juta	2
		3-5 juta	3
		5-7 juta	4
		7-10 juta	5
			6
		>10 juta	7

Setelah dilakukan pengolahan data terkait jawaban dari responden dengan menggunakan koding tersebut di atas, maka dihasilkan output analisis komputer secara regresi sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengolahan Regresi

SUMMARY OUTPUT			
Regression Statistics			
R Square		28%	
Adjusted R Square		11%	
Observations		38.00	
ANOVA			
	df	F	Significance F
Regression	7.00	1.68	0.15
Residual	30.00		
Total	37.00		

	Coefficients	t Stat	P-value
Intercept	927.80	0.47	0.64
X Variable 1	1,175.88	1.60	0.12
X Variable 2	739.54	1.93	0.06
X Variable 3	421.08	0.55	0.59
X Variable 4	- 508.96	- 0.97	0.34
X Variable 5	- 1,512.13	- 1.95	0.06
X Variable 6	609.47	1.41	0.17
X Variable 7	- 555.02	- 1.59	0.12

Dengan demikian, didapatkan persamaan regresi sebagaimana persamaan 2 setelah dilakukan analisis data sebagai berikut:

$$WTP = 928 + 1,176 X_1 + 739 X_2 + 421 X_3 - 509 X_4 - 1,512 X_5 + 609 X_6 - 555 X_7$$

Model dalam penelitian ini menghasilkan R^2 *adjusted* sebesar 11 persen yang berarti 11 persen keragaman WTP responden dengan diterangkan oleh keragaman variabel-variabel penjelas yang terdapat dalam model. Sedangkan sisanya diterangkan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam model persamaan ini. Dalam penelitian dengan *Contingent Valuation*, dalam hal ini penelitian untuk barang lingkungan, R^2 *adjusted* yang diperoleh minimal 0,15 atau 15 persen.³² Analisis WTP merupakan bagian dari analisis dengan *Contingent Valuation*, maka penelitian ini dinilai cukup baik apabila nilai R^2 yang diperoleh lebih besar dari 15 persen.

Dari tujuh variabel penjelas dalam fungsi, dua variabel yang berpengaruh nyata terhadap besarnya WTP masyarakat kantong plastik berbayar berada pada selang kepercayaan 90 persen dan 99 persen. Variabel yang berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 10$ persen adalah variabel X_2 , yakni usia dengan arah positif. Hal ini berarti semakin meningkatnya usia responden maka WTP-nya pun akan meningkat. Jika tingkat usianya meningkat 1 klaster, maka besarnya WTPnya akan meningkat pula. Variabel X_5 juga berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 1$ persen dengan arah negatif. Hal ini berarti bahwa semakin besar nilai koding tempat belanja bulanan, maka WTPnya akan semakin berkurang.

Apabila dilihat pada Tabel 3 tentang pengkodean variabel WTP, maka usia diklasterkan pada rentang 10 tahun. Maka berdasarkan hasil analisis regresi, apabila usia responden meningkat 10 tahun, maka besaran WTP untuk responden tersebut juga akan meningkat sekitar 700 rupiah. Makin tua usia seseorang, nilai WTPnya pun makin besar. Hal ini dapat diasumsikan, apabila usia makin meningkat, maka secara kemampuan finansial dianggap sudah

makin mapan, dan kesadaran akan menjaga kualitas lingkungan khususnya dari pengaruh negatif sampah plastik juga akan semakin meningkat.

Sedangkan untuk variabel tempat belanja bulanan, berdasarkan Tabel 3, diberi kode 1 untuk pasar tradisional, 2 untuk warung dan 3 untuk supermarket. Berdasarkan perhitungan regresi, makin tinggi nilai koding tempat belanja responden, maka nilai WTPnya akan semakin berkurang. Atau dapat dikatakan, responden yang memilih berbelanja di supermarket/minimarket, besaran WTPnya lebih kecil daripada yang berbelanja di warung atau pasar tradisional. Demikian juga, responden yang memilih berbelanja di warung, WTPnya lebih kecil daripada responden yang memilih berbelanja di pasar tradisional. Hal ini dapat diasumsikan, apabila responden terbiasa berbelanja di supermarket, mereka mengharapkan harga kantong plastik yang murah, sehingga tidak membebani biaya belanja bulannya. Sedangkan bagi responden yang terbiasa belanja di warung atau pasar tradisional sepertinya tidak begitu keberatan apabila harga kantong plastik mahal. Hal ini mungkin bukan karena daya beli mereka tinggi, tetapi karena mereka tidak terbiasa berbelanja di supermarket, secara keseharian lebih memilih warung atau pasar tradisional, yang mana sampai saat ini belum ada ketentuan kebijakan kantong plastik berbayar di kedua tempat tersebut.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengelolaan sampah plastik merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan, mengingat jumlah sampah plastik yang belum dikelola sampai saat ini terus meningkat. Penanganan sampah di hulu berupa pengurangan potensi timbulan sampah plastik dilakukan salah satunya dengan program kantong plastik berbayar yang telah diujicobakan di supermarket/minimarket di beberapa kota di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi masyarakat terkait pengelolaan sampah plastik cukup baik. Masyarakat berpersepsi bahwa sampah (termasuk di dalamnya sampah plastik) berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan, oleh karena itu sampah plastik perlu dikelola dengan baik. Sebagian besar masyarakat juga sudah mengetahui akan adanya kebijakan plastik berbayar ini. Namun masyarakat yang setuju dan tidak setuju pemberlakuan tarif bagi kantong plastik jumlahnya hampir seimbang. Berbagai alasan dikemukakan masyarakat terkait hal itu. Bagi yang tidak setuju, faktor ekonomi karena menambah beban biaya merupakan salah satu alasannya. Sedangkan bagi yang setuju pengenaan

³² Guy Garrod and Kenneth G. Willis, *Economic Valuation of the Environment*, USA: Edward Elgar Publications, 1999.

tarif bagi kantong plastik berbayar dilandasi persepsi bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian bagi masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.

Perhitungan WTP terhadap kantong plastik berbayar oleh responden di DKI Jakarta dan Kota Bandung menunjukkan bahwa nilai WTP adalah sebesar Rp. 1.322,-. Nilai ini lebih besar dari harga ujicoba yang pernah diberlakukan di beberapa kota. Dengan demikian, diasumsikan masyarakat di kedua kota tersebut bersedia membayar jumlah yang lebih besar untuk kantong plastik berbayar ini. Berdasarkan analisis regresi berganda didapatkan bahwa dari beberapa variabel yang dianalisis, faktor pendidikan dan tempat biasanya masyarakat berbelanja untuk kebutuhan bulanan adalah variabel yang mempengaruhi besaran WTP.

B. Saran

Kebijakan kantong plastik berbayar ini layak untuk terus dilanjutkan dengan beberapa penyempurnaan. Antara lain: sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah plastik, membiasakan masyarakat membawa kantong sendiri apabila berbelanja, dan menumbuhkan kesadaran yang terus menerus akan bahaya sampah plastik.

Kerja sama antara pemegang kebijakan (dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dengan pihak swasta, terutama pemilik retail atau pengelola supermarket/minimarket perlu terus dilakukan, agar kebijakan kantong plastik berbayar tersebut dapat dilakukan dan dimengerti tujuannya oleh semua pihak. Dari kalangan supermarket yang perlu mendapat sosialisasi secara mendalam terkait kebijakan ini sebaiknya tidak hanya kalangan top manajemen saja, tetapi sampai juga kepada petugas pelaksana di lapangan, seperti kasir. Kasir dan supervisornya perlu mengetahui dan memahami kebijakan terkait kantong plastik berbayar ini (termasuk maksud dan tujuan kebijakan tersebut, pemanfaatan dana yang terkumpul dari kantong plastik berbayar, dsb) agar mereka dapat menjelaskan alasan dan manfaat kebijakan ini apabila ada konsumen yang menanyakannya. Demikian juga, supermarket hendaknya dilengkapi poster-poster yang menginformasikan kebijakan plastik berbayar ini. Alangkah lebih baiknya jika poster-poster peduli sampah plastik juga dipampang di area supermarket, sebagai salah satu bentuk kampanye pengurangan sampah plastik.

Payung hukum untuk kebijakan tersebut perlu segera diterbitkan. Peraturan Pemerintah dan kemudian diikuti oleh Perda sangat diperlukan,

agar pelaku-pelaku usaha retail dapat turut serta berpartisipasi aktif dalam upaya pengurangan sampah plastik tersebut. Pemanfaatan dana yang terkumpul dari pembelian kantong plastik tersebut perlu diatur dan dilakukan secara transparan. Misalnya dapat digunakan untuk program-program peningkatan kualitas lingkungan, sehingga ada manfaat lainnya yang didapatkan dari kebijakan plastik berbayar tersebut.

Penelitian dan pengembangan teknologi untuk menemukan jenis-jenis kantong yang lebih ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau perlu terus dikembangkan. Agar masyarakat mempunyai alternatif lain dalam menggunakan kantong belanja yang aman bagi lingkungan, praktis dan ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, Azrul. (1990). *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Damanhuri, Enri, Tri Padmi. (2010). *Pengelolaan Sampah. Diklat Kuliah*. Program Studi Teknik Lingkungan. Institut Teknologi Bandung.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dini, Trisyanti; Dewi, Ova Candara; Vidyaningrum, Widita; Wulansary. (2014) *Jalan Terjal Bersihkan Negeri, Fakta Sampah dan 12 Kisah Terbaik Pengelolaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Sendang Bumi Wastama.
- Garrod, G and Kenneth G. W. (1999). *Economic Valuation of the Environment*. USA: Edward Elgar Publications.
- Hadiwiyoto, Soewedo, (1983), *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Inoguchi, Takashi, Edward Newman, Glen Paoletto. (2003). *Kota dan Lingkungan Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Kodoatie, Robert J. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Said, E Gumbira. (1987). *Sampah Masalah Kita Bersama*. Jakarta: PT. Medyatama Sarana Perkasa.

Sejati, Kuncoro. (2009). *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.

Sekaran, Uma. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Siagian, P. S. (1995). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soemirat, Juli. (1994). *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.

Tchobanoglous, H.H, Theisen & S.A. Vigil. (1993). *Integrated Solid Waste Management*. New York: McGraw-Hill International Edition.

Widyatmoko, Sintorini. (2002). *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*. Jakarta: Abadi Tandır.

Jurnal

Suryani, Anih Sri. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Jurnal Aspirasi* Vol. 5 No. 1 Tahun 2014.

Julien dan Mahalli, Kasyful. (2015). Analisis Ability To Pay dan Willingness To Pay Pengguna Jasa Kereta Api Bandara Kualanamu (Airport Railink Service), *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol 2, No.3, hal. 167-179

Skripsi

Prasetyo, Nugroho Joko. (2012). "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Willingness To Pay Perbaikan Kualitas Lingkungan Desa-Desa Wisata Di Kabupaten Sleman Paska Erupsi Merapi Pendekatan Contingent Valuation Method," *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Simanjuntak, Gusty Elfa M. (2009). "Analisis Willingness To Pay Masyarakat Terhadap Peningkatan Pelayanan Sistem Penyediaan Air Bersih Dengan WSLIC (Water Sanitation For Low Income Community) (Studi Kasus Desa Situdaun, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor)." *Skripsi*. Departemen Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor,

Restianingati, Vindha Tyas. (2009). "Efektivitas Program Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Komunitas di Kota Surabaya." *Skripsi*, Ilmu Administrasi Negara FISIP UNAIR, Surabaya.

Sumakul, Boby. (2014). "Valuasi Ekonomi Kawasan Karst Gunung Sewu, Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet

Abrori, Mufti., (tanpa tahun), Makalah Manusia dan Lingkungan Ilmu Sosial Budaya Dasar, (*online*), (http://www.academia.edu/8397048/Makalah_Manusia_dan_Lingkungan_ilmu_sosial_budaya_dasar, diakses tanggal 24 Februari 2016)

CNN Indonesia, 23 Februari 2016, Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Kedua Dunia, (*online*), (<http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160222182308-277-112685/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-dua-dunia/>, diakses tanggal 2 Oktober 2016).

Febiansyah, Chandra., 2 Desember 2012, Tipe-tipe Plastik yang Dapat Diolah, (*online*), (<https://chandrafebiansyah.wordpress.com/2012/12/02/tipe-tipe-plastik-yang-dapat-diolah/>, diakses tanggal 19 November 2016).

GIDKP, 13 Oktober 2016, DKI Jakarta Keluarkan Pergub tentang Kantong Plastik Berbayar, (*online*) (<http://dietkantongplastik.info/2016/10/13/dki-jakarta-keluarkan-pergub-soal-kantong-plastik-berbayar/>, diakses 21 Oktober 2016).

GDIKP, 21 September 2016, Warga Bandung Nilai Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Kurang Efektif, (*online*) (<http://dietkantongplastik.info/2016/09/21/warga-bandung-nilai-kebijakan-kantong-plastik-berbayar-kurang-efektif/>, diakses 21 Oktober 2016).

HukumOnline.com, 26 Februari 2016, Haruskah Membayar Kantong Plastik di Supermarket, (*online*), (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c772772b6e0/haruskah-membayar-kantong-plastik-di-supermarket>, diakses tanggal 2 Oktober 2016).

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 10 Juni 2015, Dialog Penanganan Sampah Plastik, (*online*), (<http://www.menlh.go.id/rangkaian-hlh-2015-dialog-penanganan-sampah-plastik/>, diakses tanggal 2 Oktober 2016)

Liputan6.com, 9 Oktober 2016, Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Kembali Berlaku?, (*online*), (<http://bisnis.liputan6.com/read/2621729/kebijakan-kantong-plastik-berbayar-kembali-berlaku>, diakses tanggal 18 November 2016).

- Liputan6.com, 13 Juli 2016, Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Sudah Berakhir?, (*online*), (<http://bisnis.liputan6.com/read/2551446/kebijakan-kantong-plastik-berbayar-sudah-berakhir>, diakses tanggal 2 Oktober 2016).
- Liputan6.com, 9 Oktober 2016, Kembali Berbayar, Berapa Harga Kantong Plastik?, (*online*), (<http://bisnis.liputan6.com/read/2621772/kembali-berbayar-berapa-harga-kantong-plastik>, diakses 20 Oktober 2016).
- PemanasanGlobal.Net, (tanpa tahun), Ada Apa dengan Kantong Plastik, (*online*), (http://www.pemanasanglobal.net/energi/ada_apa_dengan_kantong_plastik.htm, diakses tanggal 19 November 2016).
- Sanitasi.Net, (tanpa tahun), Dasar-dasar Pengelolaan Sampah, (*online*), (<http://www.sanitasi.net/dasar-dasar-sistem-pengelolaan-sampah.html>, diakses tanggal 10 September 2015).
- Suara Merdeka, 22 Juni 2016, Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Dinilai Tidak Efektif, (*online*), (<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kebijakan-kantong-plastik-berbayar-dinilai-tak-efektif/>, diakses tanggal 2 Oktober 2016).
- Tempo.co, 15 April 2012, Indonesia Hasilkan 625 Juta Liter Sampah Sehari, (*online*), (<http://www.tempo.co/read/news/2012/04/15/063397147/Indonesia-Hasilkan-625-Juta-Liter-Sampah-Sehari>, diakses tanggal 2 Februari 2016).
- Tempo.co, 15 Juli 2016, KLHK Evaluasi Uji Coba Kantong Plastik Berbayar Akhir 2016, (*online*), (<https://m.tempo.co/read/news/2016/07/15/078787886/klhk-evaluasi-uji-coba-kantong-plastik-berbayar-akhir-2016>, diakses tanggal 20 November 2016).